

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Implementasi

Salah satu proses pada suatu program adalah implementasi, biasanya implementasi ini dilaksanakan setelah sebuah program sudah dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu rangkaian aktifitas dalam rangka untuk mengantarkan sebuah program kepada masyarakat, sehingga program itu mampu menghasilkan sebagaimana yang diharapkan.⁶ Implementasi merupakan memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah diberlakukannya atau dirumuskannya sebuah program. Sehingga hal tersebut memunculkan sebuah usaha-usaha untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau berwujud kejadian-kejadian.⁷

Menurut Agustino yang dinamakan implementasi merupakan sebuah proses yang bersifat dinamis, dimana pelaksana kebijakan menjalankan aktivitas atau kegiatan, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari sebuah kebijakan itu sendiri.⁸ Secara luas maksud dari implementasi adalah sebuah pelaksana undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang

⁶ Gaffar Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2009), hal. 295

⁷ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), hal. 87

⁸ Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Horn*, <http://doi.org/kertyawitaradya.wordpress>, diakses pada tanggal 5 September 2010, hal. 139

bekerja sama untuk menjalankan suatu kebijakan dalam upaya meraih tujuan dari kebijakan program.⁹

Implementasi menjadi variabel yang penting dan berpengaruh dalam tingkat keberhasilan suatu program agar terjadi suatu dampak. Dampak dalam implementasi akan mengarah pada tujuan dari implementasi program itu sendiri. Guna memahami implementasi yang diinginkan dari suatu program maka harus memahami teori maupun konsep dari sebuah implementasi. Seperti model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yang tergolong klasik, model ini diperkenalkan pada tahun 1975. Berikut enam variabel model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn¹⁰:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi harus jelas dan dapat diukur keberhasilannya sehingga sifatnya tergolong realistis bagi agen implementasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam melaksanakan implementasi program yang mengabaikan kegagalan.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi program sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

⁹ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), hal. 23

¹⁰ Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Jakarta:Rajawali, 2010),hal. 154

Pusat perhatian agen pelaksana ini adalah seluruh kelompok yang memberikan dukungan bagi implementasi program baik itu organisasi formal maupun informal. Karakteristik yang tepat serta sesuai dengan agen pelaksana sangat perlu diperhitungkan. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi juga menjadi perhatian khusus dalam menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi maka sudah seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap/Kecenderungan para pelaksana

Semua sikap agen pelaksana baik berupa penerimaan maupun penolakan akan memberi pengaruh terhadap berhasil atau tidaknya kinerja sebuah implementasi program.

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa koordinasi adalah mekanisme yang ampuh dalam pelaksanaan implementasi program. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pelaksana implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi akan sangat kecil dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi adalah sejauh mana lingkungan *eksternal* berupa lingkungan ekonomi, sosial, dan politik ikut serta dalam mendorong keberhasilan sebuah program yang telah ditetapkan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Adapun pemberdayaan sebagai proses adalah seluruh kegiatan yang tersusun guna memperkuat kekuasaan untuk keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masaah kemiskinan. Sedangkan pemberdayaan sebagai tujuan merupakan pemberdayaan yang ditujukan untuk menuju pada sebuah keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh upaya perubahan sosial, dimana masyarakat memiliki daya keuasaan atau mempunyai pengetahuan dan mampu memenuhi kebutuahn hidup baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Wujud nyatanya yakni tumbuh rasa percaya diri, mampu menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan menjadi masyarakat yang mandiri dalam melaksanakan seluruh tugas kehidupan.¹¹

Parson berpendapat, bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses berbagai pengontrolan dan hubungan yang saling mempengaruhi segala kejadian serta seluruh lembaga yang memberi pengaruh terhadap seseorang, sehingga dapat menjadikan orang tersebut cukup kuat untuk berpartisipasi dalam melakukan proses tersebut, pernyataan ini dikutip dari Edi Suharto. Pengetahuan, ketrampilan hingga kekuasaan merupakan hal yang ditekankan pada

¹¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 59-60

manfaat yang diperoleh seseorang dalam menempuh proses tersebut serta orang lain yang menjadi perhatiannya.¹²

Sedangkan menurut pendapat Kartasasmita dikutip dari Mashoed menyatakan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mengeluarkan masyarakat dari suatu kondisi yang kini menjadi masalah utama dan perlu diubah yakni perangkap kemiskinan serta keterbelakangan, dengan cara meningkatkan harkat martabat seluruh lapisan masyarakat. Dapat dikatakan pemberdayaan ini merupakan suatu upaya agar dapat menciptakan masyarakat yang mampu dan mandiri.¹³

Secara konseptual, Pemberdayaan sangat berkaitan dengan kekuasaan, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) yang berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Secara leksikal, pemberdayaan memiliki arti penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan diserupaan dengan istilah pengembangan.¹⁴ Semakin masyarakatnya berkembang, maka akan menciptakan kemajuan masyarakat. Kemajuan ini dapat dicapai dengan adanya pemberdayaan masyarakat, dimana didalamnya terdapat unsur-unsur yang memberi harapan masyarakat untuk bertahan dan mengembangkan diri secara

¹² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung: PT Refika Aditama), hal.58

¹³ Mashoed, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Membuka Kawasan Terisolasi*, (Surabaya: Papyrus), hal. 56

¹⁴ Nanih Machendrawarty, Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), hal. 41.

dinamis. Pemberdayaan masyarakat ini menjadi sumber ketahanan nasional karena terdapat sumber wawasan politik di tingkat nasional.¹⁵

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Syarat mutlak dalam mengupayakan menanggulangi kemiskinan adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat.¹⁶ Pelaksanaan pemberdayaan ini dilakukan guna mencapai beberapa tujuan berikut:

- 1) Meberikan penekanan sebuah rasa tidak berdaya pada masyarakat yang miskin agar mereka sadar saat mereka sedang berhadapan dengan struktur sosial politik. Melakukan peningkatan kesadaran kritis yang ada pada masyarakat adalah langkah konkritnya.
- 2) Saat reformasi sosial, budaya serta politik terjadi maka sifat eksploitatif masyarakat miskin perlu diputuskan (maksudnya dalam rangka meningkatkan produktivitas bekerja serta kualitas masyarakat, maka dilakukan penumbuhan kesadaran kritis masyarakat miskin dan memberi kesempatan masyarakat miskin melaukan reorganisasi).
- 3) Menanaman jiwa persamaan (egalitarian) dan merubah pemikiran bahwa kemiskinan manusia bukanlah takdir, namun kemiskinan pada seseorang merupakan sebuah penjelmaan kontruksi sosial.
- 4) Mendorong masyaraat untuk ikut andil secara penuh dalam merealisasikan perumusan pembangunan.

¹⁵ Dwidjowinoto RN, Wrihatnolo RN, *Manajemen Pemberdayaan* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2007), hal. 75

¹⁶ Owin Jamasy, *Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: Belantika), hal. 42

- 5) Memberi masyarakat miskin berupa pembangunan sosial dan budaya.
- 6) Meratakan pendistribusian infrastruktur.

c. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses memandirikan, menswadayakan, mengembangkan, serta memperkuat posisi tawar menawar lapisan masyarakat bawah terhadap segala tekanan dari segala bidang dan sektor kehidupan. Pemberdayaan masyarakat dilihat dari penempatan posisinya, masyarakat bukan sebagai obyek penerima manfaat saja sehingga membuat masyarakat bergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan posisi masyarakat sebagai subyek partisipan yang bertindak secara mandiri. Bertindak secara mandiri disini bukan berarti terlepas dari tanggung jawab negara, melainkan pemberian layanan publik seperti pendidikan, perumahan, kesehatan, transportasi dan lain sebagainya tetap menjadi tugas atau kewajiban negara. Masyarakat sebagai partisipan berarti masyarakat yang ikut dalam proses pembangunan dan pemerintahan, sehingga membuka ruang dan mengembangkan potensi, mengontrol lingkungan dan sumber daya yang ada, menyelesaikan masalah secara mandiri, serta ikut serta menentukan proses politik di ranah negara.¹⁷

Sebuah upaya penyelesaian masalah untuk mengubah situasi atau kondisi dalam masyarakat baik secara individu maupun kelompok

¹⁷ Sutoro Eko, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Menteri Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Samarinda: Badan Diklat Provinsi Kaltim, 2002)

guna meningkatkan kualitas hidup yang lebih mandiri dan menuju sejahtera merupakan sebuah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat maka pembangunan dalam sebuah desa akan terwujud, dimana masyarakat akan terdorong untuk menuju perekonomian yang maju. Khususnya hal ini juga akan mendorong serta memotivasi potensi-potensi yang dimiliki lebih terkelola, sehingga mampu merubah masyarakat yang awalnya tidak berdaya menjadi masyarakat yang berdaya dengan cara melakukan suatu perwujudan tindakan langsung.

Dalam melaksanakan proses pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan dengan beberapa tahap yang dikenalkan oleh Kurt Lewin berupa model perubahan terencana dalam 3 tahapan, yaitu Mencairkan (*Unfreeze*), Perubahan (*Movement*) dan Membekukan Kembali (*Refreeze*).¹⁸

1. Tahapan Mencairkan (*Unfreeze*)

Langkah pertama dalam proses perubahan perilaku adalah mencairkan situasi atau status quo yang ada. Status quo disini dianggap sebagai keadaan keseimbangan yang berlaku. Proses mencairkan merupakan proses yang diperlukan untuk mengatasi tekanan secara individual dan kelompok serta dilakukan melalui 3 metode, pertama dengan meningkatkan faktor-faktor pengerak

¹⁸ Dina Mellita dan Efan Elpanso, *Model Lewin Dalam Manajemen Perubahan: Teori Klasik Menghadapi Disrupsi Dalam Lingkungan Bisnis*, Jurnal MBIA, 19(2), Agustus 2020, hlm 144, <https://doi.org/10.33557/mbia.v19i2.989>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 19.00

yang bisa menjauhkan individu atau kelompok dari situasi status quo yang berlaku saat ini. Kedua, mengurangi kekuatan-kekuatan negatif yang dapat menahan pergerakan yang menjauhi kondisi keseimbangan saat ini. Sedangkan metode ketiga adalah menemukan kombinasi dari dua metode diatas. Dalam kondisi ini ini, terdapat beberapa aktivitas yang dapat membantu proses mencairkan, termasuk didalamnya adalah memotivasi peserta perubahan dengan menyiapkan mereka untuk perubahan, membangun kepercayaan dan mengenali kebutuhan akan perubahan serta secara aktif berpartisipasi dalam mengidentifikasi permasalahan dan berdiskusi secara berkelompok untuk menemukan solusinya.¹⁹

2. Tahapan Perubahan (*Movement*)

Tahapan kedua dalam model Lewin adalah perubahan (*Movement*). Dalam tahap ini, merupakan hal yang penting untuk menggerakkan system yang ditargetkan menuju keseimbangan baru. Terdapat tiga aktivitas yang dapat membantu dalam proses pergerakan ini, yaitu meyakinkan karyawan atau peserta bahwa kondisi status quo yang mereka jalani saat ini tidak bermanfaat dan memotivasi mereka untuk melihat permasalahan dari sudut pandang yang baru dan berbeda, bekerja secara bersama-sama dalam hal-hal yang baru, memiliki informasi yang relevan serta memiliki hubungan antara

¹⁹ *Ibid.*,

yang satu dengan yang lainnya dengan saling menghormati serta memiliki pimpinan yang mendukung perubahan tersebut. Dalam tahap ini penting bagi organisasi untuk dapat mengurangi rasa takut, kekhawatiran serta ketidakyakinan individu didalamnya akan perubahan yang akan dilakukan. Karena tidak mudah dan bukan waktu yang tepat bagi anggota organisasi untuk mempelajari dan memahami perubahan sehingga perlu diberikan waktu untuk mengerti, memahami dan berdiri bersama-sama anggota organisasi menghadapi perubahan.²⁰

3. Tahapan Membekukan Kembali (*Refreezing*)

Tahapan ini perlu dilakukan setelah perubahan diimplementasikan dengan tujuan untuk mempertahankan keberlanjutannya. Jika tahap ini tidak dilakukan, perubahan yang terjadi akan berlaku secara singkat dan perilaku akan kembali ke keseimbangan yang lama. Tahapan ini merupakan proses integrasi dari nilai-nilai yang baru untuk berlaku pada komunitas yang ada. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk stabilisasi keseimbangan baru yang dihasilkan dari perubahan dengan menyeimbangkan antara faktor-faktor penggerak dan penghambat perubahan. Salah satu tindakan yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan langkah ketiga dari Lewin ini adalah memperkuat pola baru dan menetapkan pola-pola tersebut dalam bentuk mekanisme secara formal dan informal

²⁰ *Ibid.*,

termasuk didalamnya meliputi kebijakan dan prosedur.²¹

Tahap ini diperlukan upaya yang cukup besar dalam memastikan perubahan tersebut diaplikasikan, tidak hilang serta dijaga keberlangsungannya. Salah satu usaha yang perlu dilakukan adalah dengan memperkuat dan menanam perubahan dalam budaya organisasi dan diaplikasikan dalam cara berfikir dan bertindak baik bagi individu atau organisasi. Untuk menjaga keberlangsungan, penghargaan yang positif serta pengakuan dilakukan untuk memperkuat status quo yang baru karena dipercaya bahwa memperkuat perilaku akan terus diulangi.²²

.Model tahapan Kurt Lewin mengilustrasikan pengaruh kekuatan baik yang mendorong atau menghambat perubahan. Dalam hal ini, faktor penggerak yang akan mendorong perubahan secara positif, sedangkan faktor penghambat akan menahan perubahan kembali kepada status quo yang berlaku sebelumnya. Dengan demikian, perubahan akan terjadi ketika faktor penggerak lebih besar dibandingkan faktor penghambat.

3. Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan

²¹ *Ibid.*, hal. 145

²² *Ibid.*, hal. 150

potensi desa. BUMDes dikelola langsung oleh masyarakat desa sendiri dalam meningkatkan usaha dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Landasan berdirinya BUMDes diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.²³

Dalam pendiriannya, BUMDes memiliki empat tujuan utama yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.²⁴

Adapun prinsip umum pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yaitu pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip korporatif, partisipatif, emansipasif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme member-base yang dijalankan secara profesional dan mandiri.²⁵

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus

²³ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009), hal. 2.

²⁴ *Ibid.*, hal. 3

²⁵ *Ibid.*, hal. 4

bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat yang menganut asas mandiri harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes²⁶. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes mendapat modal dari pihak luar. Dengan adanya tujuan yang jelas dari pendirian BUMDes maka harus diwujudkan dengan nyata berupa memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengelolaan BUMDes sendiri dapat melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang luas. Oleh karenanya

²⁶ *Ibid.*,

BUMDes harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya.

Masalah keuangan dalam BUMDES secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005²⁷. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDES yaitu Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. BUMDES dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase permodalan BUMDES 51% adalah berasal dari Desa, sedangkan sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.

4. Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Sri Wahyuni	Tugas dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat	a. tugas BUMDes b. fungsi BUMDes c. pemberdayaan masyarakat	Memaparkan bahwa tugas dan fungsi dalam pemberdayaan masyarakat kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah berperan dan dikategorikan cukup baik.	Persamaan penelitian Sri Whyuni dengan penulis yakni pada jenis penelitian serta metode penelitiannya. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada objek penelitian yakni di BUMDes Bangun Mandiri Desa Plosorejo, Kademangan, Blitar.
2	Feny	Analisis	a.	Memaparkan bahwa	Feny Rahma dengan

²⁷ *Ibid.*, hal. 5

	Rahma Dona	Pengelolaan Unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Sebangar Mandiri Di Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017	engelolaan Unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam	pengelolaan unit usaha ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sudah dikategorikan sedang atau cukup baik.	penulis adalah sama pada metode penelitian, baik pada teknik jenis data maupun metode pengumpulan data. Perbedaannya dengan penelitian dengan yang akan ditulis yakni pada fokus pnelitiannya, bahwa penelitian Feny Rahma hanya terfokus padasatu jenis unit usaha. Sedangkan yang akan ditulis penuis tidak hanya fokus pada satu unit usaha saja melainkan upaya pemberdayaan masyarakatnya menggunakan tiga unit sekaligus.
3	Munamah	Analisis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa di kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak pada tahun 2016.	a. pelaksanaan Program Pemberdayaan b. endukung terbentuknya BUMDes	Mengemukakan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan desa dalam mendukung terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak masih dikategorikan kurang maksimal.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama mengemukakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk dijadikan sebagai wadah pelaksanaan program pemberdayaan. Perbedaan dengan yang ditulis penulis yakni letak variabel dependen dengan independennya. Penulis juga tidak hanya fokus pada satu program pemberdayaan saja, namun memaparkan beberapa program secara rinci.
4	Halimat us Sakdiah	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Desa Liberia	a. peran BUMDes b. emberdayakan ekonomi masyarakat	Peran bumdes ini masih perlu adanya peningkatan koordinasi pada elemen-elemen yang didalamnya. Namun di sisi lain, elemen BUMDESA tersebut sudah mampu memberi keadilan	Persamaan penelitian Halimatus dengan penulis adalah sama-sama menggunakan pemberdayaan sebagai variabel independen. Perbedaannya keduanya terletak pada variabel

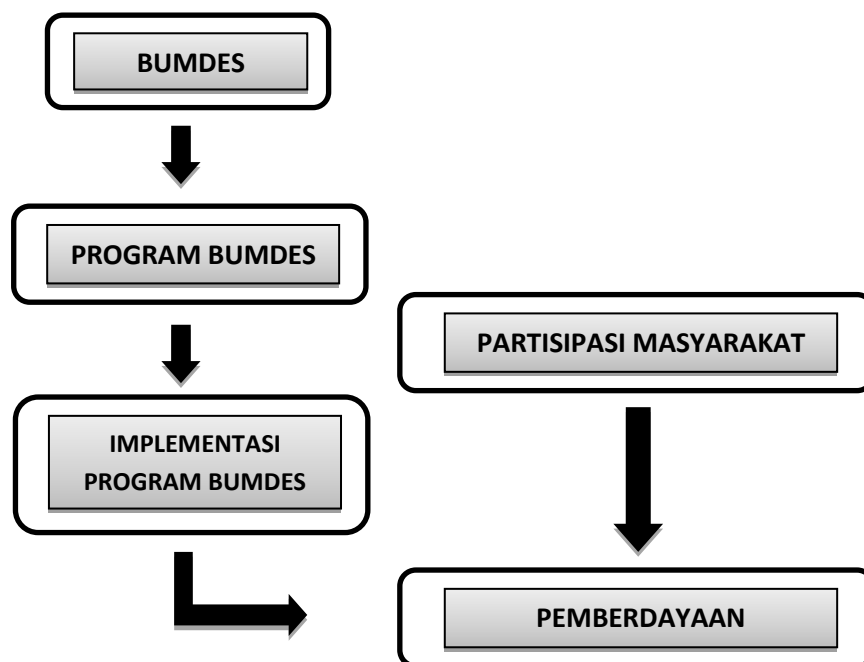
		Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2018.		dan berhasil memanfaatkan modal yang bersumber dari BUMDESA. Walaupun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dan modal BUMDESA secara keseluruhan dikategorikan masih minim.	dependennya, penulis menggunakan analisis implementasi program BUMDes sedangkan variabel dependen Halimatus adalah peran BUMDes.
5	Siswahyudianto dan Dedi Suselo	Strategi Pemberdayaan dan Inovasi Produk Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019.	a. strategi Pemberdayaan b. inovasi Produk Ekonomi Masyarakat c. adan Usaha Milik Desa di Kabupaten Tulungagung	Memaparkan bahwa strategi yang dijalankan oleh BUMDes ini memberikan kontribusi kepada PAdes secara signifikan. Pada strategi inovasi berupa berbagai produk berbasis potensi lokal BUMDes mengalami kemajuan karena bisa terealisasi.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama pada variabel dependennya membahas mengenai pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang ditulis penulis terletak pada objek penelitiannya yaitu BUMDes Lestari Karangsono, Kanigoro, Blitar
6	Reza M. Zulkarnain	Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta pada tahun 2016.	a. engembangan Potensi Ekonomi Desa b. adan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Mengemukakan bahwa kegiatan pengembangan di desa ini memang belum terealisasi, namun antusias masyarakat dalam kegiatan di BUMDes guna menyadarkan masyarakat dan memberi pengetahuan lebih mendalam mengenai keberlangsungan BUMDes sangat baik.	Persamaan penelitian penulis dengan artikel ini yakni sama-sama menjadikan BUMDes sebagai objek tempat penelitiannya, walaupun memang beda lokasi. Sedangkan perbedaan yang mendasarnya dapat dilihat pada variabel dependen dan independennya yang berbeda.
7	Kadek Darwita dan Dewa Nyoman Redana	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan	a. eranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) b. emberdayaan Masyarakat	Mengemukakan bahwa BUMDes ini secara umum telah menjalankan perannya sesuai dengan perencanaan pemerintah desa dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa hal	Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan pemberdayaan masyarakat sebagai variabel independennya. Perbedaan dengan yang dilakukan

		Pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng pada tahun 2018.	c. t enanggula ngan Pengangu ran	yang perlu adanya peningkatan	penulis adalah menggunakan analisis implementasi BUMDes sebagai variabel dependen, sedangkan jurnal tersebut menggunakan peran BUMDes sebagai variabel dependennya.
8	Romi Saputra	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tahun 2017.	a. eranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) b. mplementa si Ekonomi Kreatif c. emberdaya an Masyaraka t	Memaparan bahwa BUMDes di desaini memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan pembangunan dan perekonomian. Bahkan BUMDes ini telah berhasil mewujudkan kemandirian desa dalam menggali berbagai sumber pendapatan desa.	Persamaan jurnal Romi dengan penelitian penulis terletak pada variabel independennya, keduanya sama-sama membahas mengenai pemberdayaan masyarakat. Perbedaannya pada variabel dependennya, pada jurnal Romi variabel dependen membahas mengenai peran BUMDes, sedang penulis menganalisis implementasi BUMDes.

Penelitian ini memiliki *Novelty* atau pembaharuan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Hal ini dikarenakan penelitian saya berfokus pada Implementasi Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa sedangkan dalam penelitian terdahulu belum ada yang mengambil topik tentang topik ini. Saat ini, topik tentang pemberdayaan sering sekali menjadi perbincangan setiap badan usaha. Pemberdayaan masyarakat sangat berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian desa dan juga memberikan suasana positif bagi warga dalam mengeksplorasi potensinya.

5. Kerangka Berfikir

Menurut Muhammad kerangka berfikir digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti dengan menghubungkan antar variabel atau kerangka konsep, serta disusun berdasarkan kajian teoritik yang telah dilakukan dan di dukung oleh hasil penelitian terdahlu.²⁸ Berdasarkan pernyataan tersebut maapenulis menyusun keranga berfikir sebagai berikut:



²⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 256